

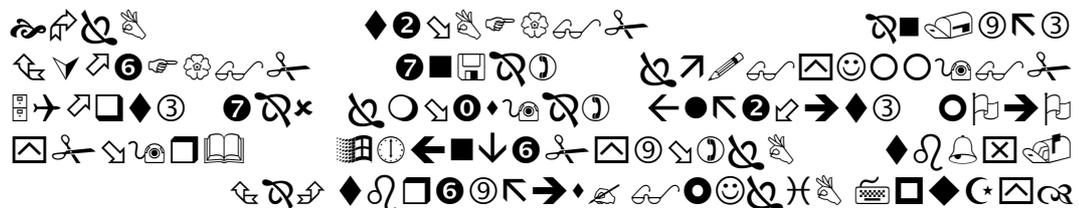
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Manajemen Keuangan/*Financial Management*

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *menagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengatur, mengurus, mengelola, membimbing dan mengawasi. Manajemen juga diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam mengatur dan menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi agar mereka bekerja dengan sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya.¹ Pengertian lain diartikan manajemen sebagai suatu proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.²

Islam mendefinisikan kata manajemen jika dinyatakan sebagai pengaturan (*al-tadbir*), kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT :



¹ Dadang Suhardan, *Organisasi dan Manajemen Pendidikan Nasional. Dalam Pengantar Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI, 2001, h. 16.

² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 1.

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.(QS. As- Sajdah: 5)³

Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah adalah maha pengatur seluruh alam semesta dan segala urusan dari langit kebumi sebelum dan sesudah, dampak atau akibatnya telah diperhitungkan dengan matang sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.⁴ Ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT, merupakan pengatur alam semesta. Akan tetapi, sebagai khalifah di bumi, manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT, mengatur alam raya ini.⁵

Kegiatan di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan yang sangat kompleks, karena membutuhkan pengaturan keuangan yang baik. Keuangan diberbagai sekolah atau lembaga/yayasan tersebut merupakan bagian yang amat penting sebab setiap kegiatan membutuhkan pendanaan (uang). Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik sehingga seluruh program pendidikan di lembaga yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

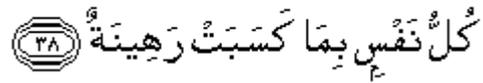
Pandangan agama Islam bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur manajemen. Berikut ini dapat kita lihat

³ As- Sajdah [32]: 5

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol11.20012: Jakarta: lentera hati, 2002, cetakan ke

⁵ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: pustaka setia, 2012, h.1-2

mengenai manajemen dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.(QS. Al Muddatstsir: 38)⁶

Jika ini di integrasikan dengan konsep manajemen maka dalam hal pengaturan baik dan rapi, tertib, teratur, jujur dan amanah maka itu sesuai dengan konsep dalam Al-Quran, karena setiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban terhadap setiap perbuatannya, termasuk dalam hal manajemen.

Istilah lain mengatakan bahwasannya manajemen keuangan pendidikan dapat kita sebut dengan pembiayaan pendidikan. Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/*mobile*, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.⁷ Menurut Departemen Pendidikan Nasional mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

⁶Al-muddatstsir [74]:38.

⁷ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 112

pelaporan.⁸ Sedangkan menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.⁹

Sulistiyorini berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.¹⁰

Maka dari beberapa pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya manajemen keuangan yaitu suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan secara efektif dan efisien dengan menggerakkan tenaga orang lain, di mulai dari penggalian sumber dana, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan dan pertanggung jawaban.

2. Sumber Keuangan dan Pendanaan Dalam Lembaga Pendidikan/ Sekolah

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan setiap

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009, h. 87

¹⁰ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 130-131

upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹¹

Sumber-Sumber Pemasukan Keuangan Sekolah menurut Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai konsekuensi logisnya maka sumber-sumber pemasukan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. 1) Pemerintah: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumber dana pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA saat ini bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); disamping itu terdapat juga dana khusus melalaui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang disebut dana khusus dari APBD I dan APBD II. Dana BOS ini, merupakan dana operasi nonpersonalia sedangkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana Rutin melalui APBN dan APBD. 2) Dana Masyarakat; dana ini bisa berasal dari SPP siswa atau komite sekolah/orangtua siswa atau dari sponsor dan donatur 3) Dana Swadaya Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain: (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4) pengelolaan jasa

¹¹ Zainuddin, M. *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 92

antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah, (6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan dll.

Selain itu bisa juga sekolah mengembangkan penggalan dana dalam bentuk: Amal *jariyah*, Zakat mal, Uang *tasyakkuran*, Amal Jumat. Selain itu bagi sekolah swasta penggalan sumber pendanaan sekolah harus terus dilakukan dengan berbagai upaya seperti mencari para Donatur berupa bantuan sukarela masyarakat umum insidental, bantuan sukarela masyarakat umum rutin, dan bantuan alumni, bisa juga berupa hasil Usaha Sekolah, Kantin Sekolah, Koperasi Sekolah, Unit Usaha sekolah, dan Penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah.¹²

Mulyasa berpendapat bahwa sumber pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga sumber, sumber-sumber tersebut antara lain:¹³

1. Pemerintah (pemerintah pusat dan daerah).

Sumber utama pembiayaan pendidikan adalah dari pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. Sumber Dari Pemerintah Pusat dan Daerah berupa APBN dan APBD melalui DAU dan DAK, dana BOS dan *block grant*.

2. Orangtua/peserta didik.

Pembiayaan dari orang tua atau keluarga biasanya dapat berupa SPP, iuran komite dan biaya pengembangan peserta didik secara pribadi.

¹²UU Republik Indonesia Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹³Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 177

3. Masyarakat.

Biaya yang berasal dari masyarakat berupa sumbangan dari perorangan, lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal dan sebagainya.

Sulistyorini menyatakan bahwa sumber dana pada sebuah lembaga pendidikan Islam atau sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu pemerintah, baik pusat maupun daerah, orang tua atau peserta didik, masyarakat yaitu para donator.¹⁴

Upaya penggalan dana biasanya sekolah Islam mengembangkannya dalam bentuk:

1. Amal *jariyah*, ini diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa.
2. Zakat mal, dalam hal ini pihak sekolah mengedarkan formulir zakat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadhan.
3. Uang syukuran, saat anak naik kelas diadakan *tasyakuran*.
4. Amal jum'at, sebagai salahsatu sarana ikhlas beramal bagi siswa.¹⁵

Beberapa hal di atas adalah upaya yang memungkinkan bagi lembaga pendidikan Islam dalam menggali dana yang berbasis pada orang tua siswa dan masyarakat. hal tersebut lebih sering dilakukan oleh lembaga Islam yang kurang mendapatkan sokongan yang memadai dari pemerintah. Memang jika kita mengamati realita pada kebanyakan lembaga pendidikan Islam, banyak berkembang model-model penggalan dana yang diterapkan. Hal ini terjadi karena

¹⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya: eLKAF, 2006, h. 132-133

¹⁵ *Ibid*, h. 131

kemungkinan sokongan dari pemerintah tidak maksimal dan kemungkinan dalam membangun jaringan masyarakat yang efektif.

Dan diantara beberapa upaya yang juga dapat dilakukan menurut Mujamil adalah:¹⁶

1. Mengajukan proposal finansial kepada pemerintah pusat maupun daerah.
2. Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada orangtua siswa.
3. Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan.
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
5. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada kolega, dan donator luar
6. Memberdayakan wakaf, hibah, infaq, jariah, dan sebagainya.
7. Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan islam untuk membantu mencari dana.

Bagi setiap lembaga pendidikan Islam untuk dapat memaksimalkan setiap upaya yang memungkinkan akan didapatkan sumber dana, tentunya dengan beberapa pertimbangan yang mendukung dari aspek situasi dan kondisi setiap lembaga pendidikan Islam.

Seperti yang diungkapkan Ahmad tafsir bahwa salah satu sumberdana bagi pendidikan Islam adalah wakaf dari orang Islam. Wakaf berasal dari amal dengan cara memanfaatkan harta, dan harta itu harus dikekalkan, atau yang digunakan adalah hasil harta itu, tetapi asalnya tetap.¹⁷

¹⁶ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 167-168

¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, h. 98

Dapat kita pahami bahwa pemberdayaan wakaf adalah sangat bagus dalam menggali dana, karena dengan modal yang tetap akan dapat menghasilkan keuntungan terus menerus. Hal ini berbeda dengan bantuan yang bersifat uang ataupun barang yang habis pakai, jadi sangat lebih efektif untuk diberdayakan.

Menurut peneliti bagi sekolah swasta yang tidak terlalu banyak dana dari pembiayaan pemerintah, maka kemandirian sekolah sangat dituntut dalam hal penggalan sumber dana, artinya sekolah harus berusaha agar sekolah tetap bisa berjalan dengan terpenuhinya segala perlengkapan dan pembiayaan sekolah serta proses pembelajaran di sekolah dapat terselenggara hingga mencapai tujuan pendidikan. Disinilah sangat perlukan kerja keras dari manajer keuangan yang dalam hal ini oleh kepala sekolah dalam memikirkan, mencari usaha, atau melobi untuk donator memperoleh sumber dana.

3. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Keuangan Lembaga Pendidikan

a. Perencanaan

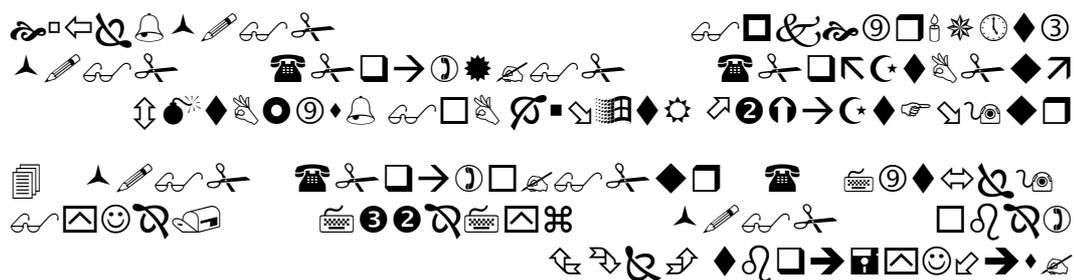
Merencanakan anggaran keuangan dalam lembaga pendidikan merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan, dan cara mencapainya.

Menurut Ramayulis:

Bahwa, perencanaan itu meliputi penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat bahkan murid. Penetapan tujuan sebagai garis pengarah dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan. Formulasi prosedur sebagai

tahap-tahap rencana tindakan, penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok kerja.¹⁸

Allah SWT mengisyaratkan pentingnya perencanaan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang telah lalu untuk merencanakan langkah-langkah ke depan. Allah SWT berfirman :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Seperti yang terdapat dalam tafsir Al-Misbah ayat tersebut menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT, dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (hari kiamat), dan selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah/lembaga pendidikan sebagai berikut.²⁰

¹⁸Romayulis, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, h. 271

¹⁹Al-Hasyr [59]: 18

²⁰Ahmad.S, diakses melalui <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>.1 februari 2016. Pkl 21.00.wib

1. Perencanaan harus realistis. Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana/fasilitas, daya/tenaga, dana, maupun waktu.
2. Perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana/ volume kegiatan sekolah yang kompleks.
3. Perencanaan harus berdasarkan pengalaman. Pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan.
4. Perencanaan harus *fleksible* (luwes). Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi.
5. Perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian.
6. Perencanaan akan menghindari *under* dan *over planning*. Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya pengelolaan operasional Sekolah.

Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (*planning*) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, *line of business*, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi: Perencanaan anggaran, Strategi mencari sumber dana sekolah, Penggunaan keuangan sekolah, Pengawasan dan evaluasi anggaran, dan Pertanggung jawaban.²¹

Menurut Nanang Fattah :

Penganggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk uang yang berguna sebagai acuan (pedoman) dalam jalannya proses kegiatan suatu lembaga dalam jangka waktu (periode) tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.²²

Lebih jauh Nanang Fatah menjelaskan dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya

²¹ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Management Kredit*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

²² Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 47

berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.²³

Morphet sebagaimana dikutip Mulyasa menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan adalah sebagai berikut.²⁴

1. Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
2. Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan mengembangkan perencanaan sistem yang efektif.
3. Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administratif. Penyusunan RAPBS memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).²⁵

b. Pelaksanaan

Pergerakan dalam sistem manajemen pendidikan Islam adalah dorongan yang didasari oleh prinsip-prinsip religius kepada orang lain, sehingga orang

²³ *Ibid.*...hal 27

²⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 196

²⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi dan...*, h. 54

tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan semangat.²⁶ Setelah dana didapatkan melalui perencanaan yang baik, maka manajer lembaga pendidikan Islam harus berusaha mengembangkannya melalui usaha-usaha produktif agar uang tidak mandek atau habis.²⁷

Hal tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian dan tentunya harus berbagi dengan alokasi dana yang akan dipakai buat operasional atau keberlangsungan lembaga dan pengadaan sarana pra sarana lembaga. Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai penentu yang berhak untuk memerintahkan pembayaran. Bendaharawan (pejabat yang berwenang melakukan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran uang dan surat berharga lainnya serta wajib membuat perhitungan dan pertanggungjawaban) sekolah Islam dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa hal:

1. Hemat dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, dan pesta.²⁸

Hal itu kiranya dalam pelaksanaan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan Islam dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sehingga mengurangi kemungkinan akan terjadi pemakaian dana yang tidak efektif atau *mubazir*. Pada hal yang sama kaitannya tentang pelaksanaan kelola keuangan, ada kiat-kiat agar sang pemberi dana kepada suatu lembaga menjadi percaya terhadap suatu

²⁶ *Ibid*, h. 274

²⁷ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta; Teras 2009

²⁸ *Ibid*, h. 135

lembaga pendidikan Islam. Pihak sekolah wajib menjaga kepercayaan itu, yaitu diantara yang dirumuskan adalah:

1. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan program yang direncanakan.
2. Anggaran harus digunakan seefisien mungkin.
3. Hindari kesan bahwa pemakaian dana sekedar menghabiskan anggaran
4. Pengeluaran dana hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang.²⁹

Diharapkan pelaksanaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam berjalan dengan bersih dan professional, sehingga para donator pun akan terjaga kepercayaannya dan pada tahap berikutnya bersedia memberikan dana lagi. Perumusan beberapa poin di atas sangat beralasan ketika kita melihat bagaimana tata kelola keuangan yang terjadi di sebagian besar lembaga pendidikan islam yang asal-asalan dan jauh dari profesionalitas. Baik itu karena kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola maupun tak adanya kejujuran di kalangan pengelola sendiri.

Pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya untuk mencapai tujuan dalam manajemen keuangan di lembaga pendidikan/yayasan, maka sangat diperlukan pengaturan dalam hal perencanaan anggaran dan juga dalam melaksanakan apa saja yang sudah di rencanakan. Dalam hal ini diperlukan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

²⁹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 169

4. Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Berikut penjelasan masing–masing prinsip manajemen keuangan yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah,

³⁰ Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*. 2007. Departemen Pendidikan Nasional, h. 9-17

masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya

partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness* "characterized by qualitative outcomes". Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*out put*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaporan dan pertanggung jawaban dalam manajemen keuangan menjadi sangat penting. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, berarti program tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap tidak efektif (gagal).

Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengetahuinya.³¹

Sistem manajemen keuangan (pendanaan), dan pertanggungjawaban merupakan salah satu kegiatan sangat vital hal ini merupakan bentuk *akuntabilitas* pengelolaan keuangan suatu lembaga, hal ini juga berlaku dalam konteks manajemen keuangan pendidikan. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, dalam manajemen keuangannya juga diadakan pertanggung jawaban, hal ini sesuai dengan prinsip dasarnya yaitu sekolah merupakan lembaga sektor publik yang pengelolaan keuangannya harus dipertanggungjawabkan seakuntabel mungkin kepada publik. Dalam implementasinya pertanggungjawaban dalam manajemen sekolah dilakukan setiap akhir tahun anggaran.³²

Semua pengeluaran keuangan di sekolah/lembaga pendidikan dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban tersebut menjadi

³¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 178

³²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 177

bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan. Pada prinsipnya pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan dari sumber anggaran. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban keuangan sekolah/lembaga pendidikan Islam haruslah tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendaharawan harus membuat laporan keuangan kepada komite/majelis lembaga untuk dicocokkan dengan RAPBS.
2. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti laporan yang ada, termasuk bukti penyetoran pajak (PPN & PPh) bila ada.
3. Kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan berupa tanda tangan, penerimaan honorarium/bantuan/bukti pengeluaran lain yang sah.
4. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh pertanggung jawaban keuangan dari komite lembaga.³³

Dalam lembaga pendidikan manapun maka harus ada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dalam hal ini kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggung jawabkan kepada

³³ *Ibid*, h. 267-268

pemerintah. Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah.

Maka dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwasannya pertanggung jawaban dalam hal keuangan di lembaga pendidikan adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan (proporsional). Yang harus dipertanggungjawabkan baik pada masyarakat dalam hal ini orang tua Siswa, komite, penyandang dana atau para donator dan pemerintah.

6. Manajemen Modern Yang Islami

Menurut Mulyasa Manajemen pendidikan pada hakikatnya menyangkut tujuan pendidikan, manusia yang melakukan kerjasama proses sistemik dan sistematis, serta sumber-sumber yang didayagunakan.³⁴ Sedangkan menurut Silalahi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien”.³⁵

Menurut Syarifudin manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya yang lainnya dalam mencapai tujuan organisasi sebagai aktivitas manajemen. Menurut Maysarah dikutip oleh Sulistyorini menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses

³⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

³⁵ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2011

melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.³⁶

Manajemen dalam lembaga pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan dengan mengembangkan dan mengelola sumber daya dan potensi-potensi yang dimiliki dalam sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien.

Keberhasilan dari sebuah manajemen dalam hal ini manajemen keuangan tidak lepas dari adanya kepemimpinan dalam menggerakkan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Sumber daya manusia tersebut adalah adalah para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di lembaga sekolah tersebut. Para pegawai/karyawan tersebut di samping memiliki kemampuan teknis (*Hardskill*), harus juga memiliki *Soft Skill* yaitu sifat pribadi yang tercermin dari perilaku seseorang.

Menurut Hafidhuddin bahwasannya manajemen Syari'ah adalah perilaku yang terkait dengan nilai keimanan dan ketauhidan. Jika kegiatan seseorang yang tergabung dalam sebuah lembaga didasari oleh nilai tauhid, maka dia menyadari bahwa adanya pengawasan dari Allah, dan hal ini juga di sampaikan oleh Imam Suprayogo, aktifitas perubahan selalu didasarkan dan diinspirasi pada prinsip Iman dan Amal saleh.³⁷

³⁶ Rudi Siswoyo, di akses melalui <http://rudisiswoyoalfikir.blogspot.co.id/2014/04/makalah-konsep-manajemen-keuangan.html>. 23 Januari 2016. at 09.46

³⁷ Fridiyanto, diakses melalui http://www.academia.edu/3136880/Manajemen_Perubahan_Studi_Kepemimpinan Prof. Dr. Imam Suprayogo UIN Malang. 23 Januari 2016, at 00.06 wib

Pengertian taqwa kalau ditafsirkan secara populer adalah taat pada Sang Khalik serta bermanfaat bagi sesama dan lingkungan. Jika dilihat dalam konteks dunia kerja konotasi taqwa dapat dipahami sebagai manusia (karyawan, pelaku bisnis) yang memiliki etos kerja tinggi, sungguh-sungguh mengemban tugas dan tanggungjawab serta piawai dalam menjalankan pekerjaan.

Ketaqwaan seseorang dapat berbanding lurus dengan kemampuan mengelola unjuk kerja pada tingkat yang optimal. (*maximize achieved performance*). Bagi orang bertaqwa tiada hari tanpa melakukan perbuatan yang menghasilkan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dilihat dari konteks ini peran kecakapan insaniyah-popular disebut *softskills* memiliki nilai kontribusi signifikan dalam meningkatkan produktivitas kerja seseorang.³⁸

Bahwasannya dalam sebuah manajemen dilembaga pendidikan yang salah satunya mengelola keuangan sekolah maka faktor yang tidak kalah pentingnya sebagai penunjang tercapainya tujuan sekolah adalah orang-orang yang memiliki kemampuan teknis administrasi dan juga orang-orang yang memiliki *softskill* yang lahir dari ketakwaan individu untuk meraih Ridho Allah SWT semata.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sejauh yang diketahui oleh penulis, penelitian tentang manajemen keuangan masih cukup sulit ditemui dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, skripsi maupun tesis. Faktor keengganan dari para peneliti dan adanya anggapan “tabu” bagi sebagian pemegang kekuasaan di masing-masing instansi, perusahaan atau

³⁸ Aries Musnandar, di akses melalui <http://pasca.uin-malang.ac.id/marhaban-ya-ramadhan-sarana-meningkatkan-kualitas-unjuk-kerja/>23 Januari 2016, at 01.06 wib

organisasi untuk membuka diri terhadap penelitian tentang keuangan yang menjadi “rahasia intern” instansi, perusahaan atau organisasi bersangkutan, menjadi penyebab utama sedikitnya hasil-hasil penelitian tentang manajemen keuangan yang terpublikasikan ke media. Namun demikian ada beberapa judul penelitian serupa yang masih bersinggungan langsung dengan masalah manajemen keuangan/pendanaan di lembaga pendidikan, antara lain:

1. Norliana, judul penelitian “*Manajemen Keuangan Sekolah Perspektif Islam (Studi Pada Sekolah Dasar Integral Hidayatullah Kota Palangka Raya)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber – sumber dana tahun 2013/2014, perencanaan dan pelaksanaan Anggaran, pengawasannya dan pertanggung jawaban pada SD Integral Hidayatullah Palangka Raya, masalah yang di angkat pada penelitian yaitu dari mana sumber dana, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan anggaran, bagaimana pengawasannya dan bagaimana pertanggung jawabannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menawarkan sebuah konsep manajemen keuangan sekolah perspektif Islam, yaitu aktifitas mengelola keuangan sekolah dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen Islami agar lembaga pendidikan memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik.³⁹
2. Rachman Firdaus, judul Penelitian”*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang upaya- upaya strategis

³⁹Norliana, *Manajemen Keuangan Sekolah Perspektif Islam (Studi Pada Sekolah Dasar Integral Hidayatullah Kota Palangka Raya)*, S2 Tesis, 2015, IAIN Palangka Raya

Lembaga Pendidikan Swasta dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pendidikan, dan informasi mengenai pengelolaan sumber dana pada Lembaga Pendidikan Swasta, terfokus pada Empat Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Asing di Bandung. Permasalahan penelitian adalah bagaimana Lembaga Pendidikan Swasta dapat mengelola secara tepat arah dalam hal mengembangkan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitasnya sehingga dapat menjadikan dirinya sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian antara lain: Pertama, proses penyusunan pembiayaan pendidikan secara umum mempertimbangkan komponen-komponen mandat lembaga, tuntutan *stakeholders*, dan tuntutan pesaing. Kedua, upaya strategis dalam menggali sumber-sumber dana dari masyarakat ditempuh melalui dua pendekatan strategis yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Ketiga, proses pengawasan kinerja Lembaga dilaksanakan berkaitan dengan akuntabilitas terhadap mutu pendidikan, dengan cara evaluasi dan analisis. Keempat, mutu pendidikan menunjukkan keterkaitan yang erat dengan ketersediaan dana. Sistem pembiayaan yang efektif, efisien dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup Lembaga Pendidikan.⁴⁰

⁴⁰Rachman, Firdaus, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta, (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella), Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, S2 thesis, 2004

3. Diyah, P.D, judul penelitian “Evaluasi Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah”. Penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan keuangannya, Apa saja faktor penunjang dan penghambatnya, Dan bagaimana evaluasi pengelolaan keuangannya. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Hasil dari penelitian ini Secara umum, bahwasannya pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan.⁴¹
4. Anis, W.H, judul penelitian “Manajemen Sumber Dana” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manajemen sumber dana pendidikan yang dianggap penting oleh pondok pesantren. Adapun permasalahannya adalah mengapa manajemen sumber dana pendidikan menjadi hal yang urgen bagi pondok pesantren?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat inquiry naturalistik, didukung dengan pendekatan studi kasus etnografi, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi: studi dokumen, observasi dan wawancara mendalam. Temuan dari pada penelitian ini mendeskripsikan bahwa manajemen sumber dana di Pondok pesantren *Al-Ishlahiyah* Singosari

⁴¹Diyah P.D, Tesis Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Studi Kasus Pengelolaan SMP Negeri di Kab. Banyumas, Perpustakaan UI

Malang 2008, diimplementasikan dengan tahapan perencanaan yang terdiri atas perencanaan (Penyusunan anggaran), pelaksanaan program serta monitoring (Evaluasi) dengan tetap berpegangan pada model “*open management*” terhadap pengelolaan sumber-sumber dana yang ada (Pemerintah (*World bank*), masyarakat (*Syahriyah* santri/wati), unit usaha koperasi/kantin, wartel dan mebel), dibekali dengan *planning* dan *thinking strategy* lewat pengadaan program pelatihan (*In-service training*) bagi tenaga kependidikannya. Sedangkan efektifitas manajemen yang dilakukan berimplikasi pada bertambahnya lembaga pendidikan di bawah naungannya serta meningkatnya mutu/kualitas para tenaga dan santri/wati, yang mana hal tersebut terwujud disebabkan oleh baiknya jalinan hubungan (*Lobbying*), begitupun pula dengan adanya program *profesionalisasi* terhadap tenaga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Singosari Malang.⁴²

Penelitian yang relevan yang sudah diteliti tersebut, maka jika dilihat dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan, bahwa dalam penelitian ini ada beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian ini lebih difokuskan yaitu menggali lebih dalam bagaimana Manajemen Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah I Palangka Raya, hingga sekolah ini bisa mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

⁴² Anis W.H, *Manajemen Sumber Dana*, Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Singosari Malang, 2008, tesis.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Norliana,(2015), Manajemen Keuangan Sekolah Perspektif Islam (Studi Pada Sekolah Dasar Integral Hidayatullah Kota Palangka Raya)	Menawarkan konsep manajemen dalam perspektif Islam	Terdapat persamaan pada masalah penelitian	Menggali konsep manajemen keuangan sekolah di SMA Muhammadiyah I Palangka Raya
Rachman, F, (2004), Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta, (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella)	Mutu pendidikan menunjukkan keterkaitan yang erat dengan ketersediaan dana. Sistem pembiayaan yang efektif, efisien dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup Lembaga Pendidikan	Terdapat beberapa persamaan pada masalah penelitian	Peneliti hanya fokus pada manajemen keuangan yg di laksanakan di sekolah
Diyah P.D, Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Studi Kasus Pengelolaan SMP Negeri, Kab. Banyumas	Pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan	Terdapat beberapa persamaan dalam masalah penelitian	Peneliti ingin menemukan konsep manajemen keuangan sekolah di SMA Muhammadiyah
Anis W.H, (2008), <i>Manajemen Sumber Dana</i> , Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Singosari Malang	Berimplikasi pada meningkatnya mutu pesantren dan dapat meningkatkan profesional guru dengan adanya biaya untuk pelatihan	Terdapat persamaan dalam masalah penelitian	Fokus penelitian sampai menemukan konsep manajemen keuangan sekolah